

Perspektif penjeraman dalam rangka kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan = Perspectives deterrent in order policy criminal sinking ship thieves fish / Raka Momon Saputra

Raka Momon Saputra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445862&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Nama : Raka Momon Saputra NPM : 1406518276 Program Studi : Kriminologi Judul Tesis : Perspektif Penjeraman Dalam Rangka Kebijakan Kriminal Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Kegiatan illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal illegal asing KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan dalam perspektif penjeraman serta merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan agar tetap mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. kegiatan pencuri ikan lebih banyak dilakukan oleh kapal illegal asing dengan perbandingan 63 KIA dan 37 kapal illegal Indonesia KII . Jenis pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap tidak sesuai dengan dokumen perizinan. Wilayah terbanyak kegiatan IUU fishing di WPP-NRI 711 meliputi perairan selat karimata, laut natuna, dan laut cina selatan. Penenggelaman kapal pencuri ikan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini adalah suatu tindakan yang sangat tegas dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya tingkat eksploitasi illegal terhadap sumber daya ikan sekitar 30-35 . Pemikiran pengentarjeraman menurut Winters et al, 2014, bahwa proporsionalitas adalah kekuatan penghukuman yang proporsional dengan tingkat keseriusan kejahatan. Severity adalah kekuatan penghukuman serta kecepatan penghukuman yang diberikan setelah kejahatan terjadi, akan semakin berpengaruh terhadap pelaku kejahatan. Kepastian penghukuman harus merupakan tindakan yang pasti dijatuhkan dan tidak dapat dihindari. Merancang kebijakan kriminal penenggelaman kapal pencuri ikan, agar mampu memberikan efek jera dimasa yang akan datang adalah dengan sebanyak mungkin mengembangkan MoU dengan negara-negara lain. Dibuatkan aturan-aturan yang jelas dari MoU tersebut dan selanjutnya dilakukan deklarasi dengan negara-negara tetangga.

<hr />

ABSTRACT

ABSTRACT Name Raka Momon Saputra NPM 1406518276 Study program Criminology Thesis Title Perspectives deterrent In Order Policy Criminal Sinking Ship Thieves Fish Illegal Fishing activity which is most often occurs in the area of fisheries management Indonesia is illegal fishing by foreign vessels illegally KIA , which comes from several neighboring countries. This thesis aims to determine the criminal policy of sinking fish thieves in the perspective of deterrence and designing criminal policies sinking fish thieves in order to remain able to provide a deterrent effect in the future. This study used a qualitative approach. Illegal fishing activity is mostly done by illegal foreign vessels with a ratio of 63 KIA and 37 illegal vessels Indonesia KII . The type of offense are often done are not to have licensing documents and using gear not in accordance with the authorization document. The region most IUU fishing WPP NRI 711 is includes Karimata Strait, Natuna Sea, and South China Sea. Sinking of the fish thieves that have been implemented

by the current administration is an act that is very firm and effective. It can be seen from the decline in the level of illegal exploitation of the fish resources approximately 30 35 . Thought deterrence deterrent according to Winters et al, 2014, that proportionality is the power of punishment proportionate to the seriousness of the crime. Severity is the power of condemnation, as well as the speed of the judgment is given after the crime occurred, will increasingly influence the perpetrators. Certainty of punishment should be a definite action was dropped and can not be avoided. Designing the criminal policy of sinking the illegal fishing vessels, in order to provide a deterrent effect in the future is to develop as much as possible Indonesia MoU with other countries. Made the rules clear of the MoU and then performed a declaration with neighboring countries.